

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi persaingan usaha antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing semakin keras. Masing-masing perusahaan berusaha mempertahankan eksistensinya melalui program dan strategi yang dimiliki agar dapat mencapai visi, misi dan tujuan dari perusahaan tersebut. Sejalan dengan pertumbuhannya untuk memperluas jaringan usaha, mempertahankan *going concern*, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, perusahaan dihadapkan pada kemampuan mereka untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, membiayai pembelian barang modal sekaligus memperbaiki sistem operasional mereka sehingga selalu *up to date* dengan menggunakan teknologi yang tersedia.

Agar tujuan diatas dapat dicapai, maka dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, pembiayaan barang modal adalah pos yang paling banyak membutuhkan dan menghabiskan modal perusahaan, karenanya saat ini banyak perusahaan yang mencari sumber-sumber pembiayaan yang tidak terbatas yang dapat diperoleh dari pinjaman bank, sumber-sumber pasar uang dan sumber-sumber pasar modal. Tetapi dalam mencari sumber-sumber pembiayaan ini, perusahaan sering kali mengalami hambatan khususnya dalam keadaan krisis yang

dialami Indonesia saat ini, dimana semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi, perubahan kurs dollar yang tidak menentu. Oleh karena itulah, diperlukan alternatif pembiayaan yang lebih sederhana. Salah satu alternatif pembiayaan yang akhir-akhir ini semakin diminati adalah *leasing* (sewa guna usaha), hal ini dikarenakan *leasing* dinilai lebih menguntungkan daripada pinjaman dari bank karena dengan melalui *leasing* kita dapat memperoleh pengadaan barang yang lebih cepat.

Sekarang ini usaha *leasing* banyak diminati oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, karena dengan *leasing* dapat dengan cepat diperoleh barang-barang modal yang dapat digunakan langsung dalam proses produksi. Usaha *leasing* diperkenalkan untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri : Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dengan No.Kep-122/Mk/IV/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/51/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*. *Leasing* adalah suatu perjanjian yang mempunyai sifat-sifat tersendiri, yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian seperti pembelian dengan angsuran maupun pinjaman uang dari bank.

Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal) untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*, *lessee* dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak (Suandy, 2006:51). Dengan demikian, hak milik atas

barang modal tersebut tetap menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak *lease*.

Dalam kaitan penentuan pemilihan sumber pembiayaan perusahaan tidak bisa mengesampingkan aspek perpajakan dalam pemilihan kebijakan ini. Perusahaan setidaknya mesti menyadari apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan perolehan pembiayaan dapat menyebabkan pembengkakan biaya pajak yang dapat mengurangi perolehan laba perusahaan, karena di dalam laporan laba-rugi komersial ada biaya yang harus dikoreksi secara fiskal, karena prinsip fiskal yaitu *Deductible Expenses - Taxable Income* yaitu biaya yang dapat dikurangkan merupakan penghasilan bagi yang menerima. Dan *Non Deductible Expenses - Non Taxable Income* yaitu biaya tidak dapat dikurangkan maka bukan penghasilan bagi penerimanya.

PT "X" yang berkedudukan di Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan gas dalam negeri. Sesuai anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama dalam bidang penjualan gas, baik gas medis maupun non medis serta pendapatan atas jasa instalasi. Perusahaan ini mulai beroperasi sepada tahun 1975 dan saat ini perusahaan sudah mencapai level multinasional.

Dalam rangka untuk memperluas jaringan bisnis dan adanya kerjasama khusus dengan salah satu perusahaan swasta lain, perusahaan melakukan pembukaan cabang baru di daerah Gresik untuk membantu proses pendistribusian dan produksi atas barang jadi liquid yang selama ini suplai untuk seluruh cabang operasi disuplai oleh pabrik group yang berada di wilayah Driyorejo.

Perusahaan berencana untuk menambah 8 (Delapan) unit kendaraan Truk untuk proses distribusi dalam kaitannya meningkatkan volume produksinya. Perusahaan bekerja sama dengan salah satu Bank BUMN terkemuka untuk pembelian kendaraan-kendaraan tersebut secara kredit, namun hal tersebut ditentang oleh jajaran manajemen perusahaan karena terindikasi bahwa kebijakan perusahaan yang mengedepankan perencanaan pajak tidak berjalan. Untuk itu perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk memilih satu diantara dua cara pembelian yaitu lewat pembelian secara kredit bank atau melalui *leasing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu **“Simulasi Penerapan Perencanaan Pajak Atas Perolehan Kendaraan *Leasing* Dengan Hak Opsi, Hutang Bank, dan Pembelian Tunai pada PT.X”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Simulasi perencanaan pajak dalam memilih alternatif cara pembelian kendaraan yang dapat menguntungkan PT. “X” dalam kaitannya meminimalkan beban pajak penghasilan (PPh).

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, maka manfaat yang ingin diperoleh adalah :

1. Bagi Mahasiswa akuntansi, untuk mengetahui penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan serta perbandingan teori atas konsep penandingan yang didapat saat kuliah dengan praktik.
2. Bagi Masyarakat umum, untuk memberikan pengetahuan umum mengenai cara-cara penghematan beban pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan
3. Memberikan informasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atas bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Ide pokok yang terkandung dalam masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yaitu diuraikan mengenai latar belakang pengambilan perencanaan pajak atas pemilihan alternatif pembelian leasing dengan hak opsi, hutang bank dan pembelian tunai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan PT X, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan skripsi. Selain itu bab ini juga menjelaskan sejarah singkat mengenai kegiatan usaha PT X.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mencoba mengaitkan masalah tentang teori konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara

mengungkapkan dasar – dasar teoritis, konseptual dan logis. Menjelaskan kriteria tentang aset tetap, keuntungan dan kerugian sewa guna usaha dan dampaknya ke laporan keuangan perusahaan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, desain penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penyelesaian skripsi ini.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang didalamnya akan menguraikan secara singkat tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Pada bab ini juga dibahas mengenai analisis pembahasan dan pemecahan masalah melalui pengolahan data-data perusahaan seperti: kebijakan akuntansi perusahaan yang berhubungan dengan desain perencanaan pajak, laporan pembelian aset tetap kendaraan Truk yang dianalisis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjadi akhir dari penyusunan skripsi yang mengemukakan sebuah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan disertai dengan pemberian saran mengenai desain perencanaan pajak kepada perusahaan. Sehingga pada akhirnya dapat membantu terselenggaranya perencanaan pajak yang baik